

Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pembangunan Gedung Sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Policy Impact Evaluation of School Building Program by Surabaya City
Education Department

¹Ratih Nuksmengtyas & ²Bambang Kusbandrijo

¹Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Evaluasi,
Dampak,
Kebijakan,
Pendidikan.

Article History:

Received : 30 Mei 2023

Accepted : 8 Juni 2023

Publish : 27 Juni 2023

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak kebijakan program pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan yang meliputi permasalahan struktur kelembagaan, sumber daya (manusia, material, mesin, anggaran/money, metode), kesesuaian peraturan, inovasi serta keberlanjutan. Sedangkan dampak yang terjadi dapat bersifat individual, organisasional maupun sekolah. Upaya dalam mengatasi permasalahan dan dampak tersebut adalah dengan melakukan strategi kebijakan berupa perbaikan struktur kelembagaan, pemenuhan sumber daya, penganggaran pembangunan gedung sekolah secara tepat, analisis beban kerja yang lebih cermat serta penyusunan perencanaan serta rencana aksi program pembangunan gedung sekolah, pada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang yang dikomunikasikan secara intens antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan pihak swasta.

ABSTRACT:

This study aims to identify and evaluate the impact of the school building development program policy by the Surabaya City Education Department by using a qualitative descriptive paradigm. The results of the study indicate that there are problems in the implementation of school building construction by the Education Department which includes issues of institutional structure, resources (people, materials, machines, budget/money, methods), compliance with regulations, innovation and sustainability. While the impact that occurs can be individual, organizational or school. Efforts to overcome these problems and impacts are by implementing policy strategies in the form of improving institutional structures, fulfilling resources, budgeting for the construction of school buildings in an appropriate manner, more careful analysis of workloads and preparing plans and action plans for school building development programs, both short term, long term medium term, as well as the long term which is communicated intensely between the school, the Education Department and the private sector.

How to Cite:

Nuksmengtyas, R., Kusbandrijo, B. (2022). Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pembangunan Gedung Sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 17(1), 99-107. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i1.550>.

[✉]Corresponding author :

Address : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118

Email : b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 99-107

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu inisiatif yang diambil adalah melalui program pelayanan pembangunan gedung pemerintah, terutama gedung sekolah. Program ini dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur pendidikan di kota tersebut.

Pelayanan pembangunan gedung sekolah memiliki arti penting dalam upaya penyediaan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan memperbaiki dan membangun gedung sekolah yang baik, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kota Surabaya. Gedung sekolah yang memadai tidak hanya memberikan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, tetapi juga mendorong motivasi dan semangat belajar mereka.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Surabaya berupaya pemerataan akses pendidikan bagi semua warga kota, terlebih lagi bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dalam jangka panjang, program pelayanan pembangunan gedung sekolah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam memajukan pendidikan dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan berdaya saing. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki infrastruktur pendidikan guna mewujudkan kota yang lebih maju dan berkualitas.

Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan program pembangunan gedung sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik. Program ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya, penyelenggaraan pembangunan gedung sekolah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCCKTR). Namun, sejak Tahun Anggaran 2022, tanggung jawab tersebut dialihkan ke Dinas Pendidikan.

Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan program, beberapa tenaga teknis yang sebelumnya bekerja di DPRKPCCKTR telah dipindahtugaskan ke Dinas Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan yang terkait dengan pembangunan gedung sekolah. Perpindahan tanggung jawab ini sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pelayanan pembangunan gedung sekolah dapat lebih efektif dan efisien. Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara baru memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih spesifik dalam bidang pendidikan, sehingga mampu mengoptimalkan pembangunan gedung sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan demi memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat kota, serta mendukung perkembangan dan kemajuan pendidikan di Surabaya.

Kebijakan pembangunan gedung pendidikan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan ternyata banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Selain itu, penentuan organisasi perangkat yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana pembangunan gedung sekolah ternyata belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak kebijakan program pembangunan gedung sekolah oleh Dinas

Pendidikan Kota Surabaya. Penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi dampak-dampak yang muncul dari kebijakan tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan gedung sekolah serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia pendidikan Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan telah dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek sosialisasi kepada masyarakat, manajemen implementasi, kualitas sarana dan prasarana, sumber daya yang tersedia serta penerapan reformasi birokrasi (Sabrina, 2019; Hanjarwati & Aminah, 2014; Barliana dkk., 2010; Asyiah dkk., 2017; Berthanilla dkk., 2019).

Menurut Indradi (2006) administrasi publik merupakan sebuah rangkaian proses yang mengorganisir sumber daya dan personil publik kemudian dikoordinasikan. Hasil dari koordinasi ini kemudian digunakan untuk menyusun formulasi, implementasi dan dasar dalam mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik.

Ruang lingkup administrasi publik juga diungkapkan oleh Pasolong (2008), dimana pada intinya ruang publik administrasi publik meliputi organisasi publik, birokrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, administrasi kepegawaian negara, peristiwa dan gejala

pemerintahan, birokrasi publik, kinerja, ruang lingkup administrasi publik di bidang hubungan, etika administrasi publik, kepemimpinan

Kebijakan publik dilakukan untuk memecahkan masalah serta mencapai tujuan serta sasaran tertentu. Hanya permasalahan publik yang melibatkan dan menggerakkan orang banyak dalam mencari solusi yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kebijakan publik (Widodo, 2012).

Evaluasi merupakan tahap yang paling akhir di dalam proses penyusunan kebijakan publik. Evaluasi digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan sesuai rencana atau tidak. Kusumanegara (2010) menyampaikan evaluasi kebijakan pada intinya mempelajari konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Subarsono (2005), dapat dilakukan metode-metode dalam melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan, yaitu *Single program after – only, single program before – after, comparative after – only, comparative before – after*.

Di dalam evaluasi ditemukan juga beberapa unit sosial yang terkena dampak kebijakan (Wibawa, 1994), yaitu dampak individual, dampak organisasional, dampak pada masyarakat, dampak pada lembaga dan sistem sosial. Meskipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin jauh dari yang diharapkan atau diinginkan, tetapi penting untuk diakui bahwa kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah atau badan otoritas memiliki tujuan tertentu, baik untuk memecahkan masalah, meningkatkan pelayanan, atau mengatasi isu-isu sosial.

Meskipun hasil yang diharapkan mungkin tidak selalu tercapai sepenuhnya, kebijakan tersebut masih memiliki konsekuensi yang berdampak penting. Pertama, kebijakan dapat mengubah dinamika sosial, ekonomi, atau politik suatu masyarakat. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam distribusi kekayaan, struktur sosial, atau hubungan kekuasaan antar kelompok. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut dapat meratakan kesenjangan atau meningkatkan aksesibilitas, sementara dalam kasus lain, dapat menimbulkan ketidaksetaraan atau meningkatkan ketegangan sosial. Kedua, kebijakan juga dapat mempengaruhi kehidupan individu secara langsung. Misalnya, kebijakan kesehatan dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, kebijakan pendidikan dapat memengaruhi ketersediaan dan mutu pendidikan, dan kebijakan ekonomi dapat memengaruhi lapangan kerja dan stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, meskipun hasil yang diharapkan mungkin tidak tercapai sepenuhnya, penting untuk mengakui bahwa kebijakan memiliki dampak dan konsekuensi yang penting bagi masyarakat. Evaluasi yang cermat dan pemantauan terus menerus terhadap kebijakan tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdampak positif sebanyak mungkin bagi masyarakat yang dilayani.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi dampak *Single Program After-Only* pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan meliputi kelompok sasaran :

- a. Dampak individual (pelaksana pembangunan gedung sekolah)
- b. Dampak organisasional (Dinas Pendidikan)

- c. Dampak pada sekolah selaku pengguna gedung sekolah

Peneliti hendak melihat keadaan masing-masing kelompok sasaran sesudah program pembangunan gedung sekolah diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif (Moloeng, 2002). Berbekal pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti ingin menggambarkan bagaimana evaluasi dampak penyelenggaraan pembangunan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Penelitian ini dapat menggali data secara mendalam dampak penyelenggaraan pembangunan gedung sekolah yang diharapkan dan tidak diharapkan sehingga dihasilkan penelitian yang tajam, detail dan komprehensif.

Objek dan informan penelitian adalah pelaku pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, selaku pengendali pekerjaan pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (PPKm).
- b. Pelaksana Tugas Tim Teknis kegiatan Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (Ka. Rayon) yang melaksanakan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan survey sampai dengan pelaporan kepada PPKm.
- c. Pelaksana Tugas dan Tim Teknis Pengelola Gudang Material dan Administrasi Proyek (Ka. Sekpro) yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat keluar masuk barang ke gudang material serta menangani semua administrasi proyek paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.

d. Pengurus Musyawarah Kerja Kepala SMP Negeri (MKKS). MKKS atau musyawarah kerja kepala sekolah adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMP.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dimana data dapat secara langsung memberikan data kepada para pengumpulnya Sugiyono (2009 : 62). Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan wawancara tak terstruktur dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pejabat pembuat komitmen, beberapa pelaksana tugas serta ketua perkumpulan Kepala Sekolah untuk menggali implementasi program tersebut. sedangkan teknik analisis data meliputi 3 langkah pokok yaitu: 1) melakukan reduksi data melalui kata-kata kunci yang ada, 2) melakukan penyajian data sehingga mudah dalam memahami dan menganalisa kemudian 3) menyusun verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan Kota Surabaya merupakan lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan memiliki visi mewujudkan pendidikan Surabaya yang bermutu, humanis, dan berkelanjutan. Sedangkan misi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pendidikan Surabaya yang bermutu
- b. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

c. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis digital yang humanis dan bergotong-royong.

Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu Bidang Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan serta Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta UPTD.

Anggaran pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ada pada 2 (dua) bidang yang berbeda yaitu Bidang Sekolah Dasar untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung jenjang SD serta Bidang Sekolah Menengah untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung jenjang SMP. Sedangkan untuk penganggaran gaji satuan tugas (satgas) rehabilitasi gedung sekolah berada pada Sekretariat

Setelah melakukan penggalian data terhadap keseluruhan informan, peneliti menyusun reduksi data dan pola hubungan terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya menghadapi sejumlah masalah yang perlu diperbaiki.

Pertama, terdapat kebutuhan untuk memperbaiki struktur kelembagaan dalam Dinas Pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan juga kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pembangunan, termasuk jumlah dan kualifikasi personil yang kurang memadai. Kebutuhan akan sumber daya lainnya seperti material dan peralatan juga harus diperbaiki. Kemudian anggaran yang dialokasikan tidak dapat menghasilkan output secara optimal. Selanjutnya, penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan hirarki peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan

gedung sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Masalah lainnya termasuk pembangunan yang belum tuntas, pemenuhan material yang kurang, dan kurangnya dukungan untuk inovasi di sekolah. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian juga seringkali lebih lama dari yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan, terdapat dampak yang timbul pada tingkat individual, organisasional, dan sekolah. Pada tingkat individual, dampak yang terjadi adalah kualifikasi pemimpin yang tidak sesuai dapat menghambat pelaksanaan program. Pada tingkat organisasional, dampak yang muncul adalah terhambatnya pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pada tingkat sekolah, dampaknya adalah kepercayaan terhadap organisasi semakin menurun. Untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan gedung sekolah, perlu dilakukan sejumlah upaya. Pertama, perlu dilakukan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu diperhatikan juga efektivitas dan efisiensi anggaran yang digunakan. Penghargaan yang layak kepada SDM juga penting dilakukan. Komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, perencanaan yang matang, dan transparansi anggaran juga merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan gedung sekolah.

SIMPULAN

Program Pembangunan Gedung Sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengalami masalah dalam pelaksanaannya, yaitu permasalahan yang terkait dengan:

- Struktur kelembagaan, pelaksana teknis di lapangan sulit untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan output kinerjanya karena penanggung jawab pekerjaan secara hirarki kelembagaan bukan merupakan atasan dari pelaksana

teknis. Sebaliknya penanggung jawab juga sulit untuk melakukan monitoring karena pelaksana teknis di lapangan bukan merupakan bawahan secara hirarki kelembagaan.

- Sumber Daya (Manusia, Material, Mesin, Anggaran atau *Money*, Metode). Jumlah dan kualifikasi sumber daya baik sumber daya manusia, material maupun mesin di Dinas Pendidikan sangat terbatas. Kemudian anggaran yang dialokasikan tidak dapat menghasilkan output secara optimal. Selain itu metode pelaksanaan manajemen beban kerja pegawai pun kurang berjalan dengan baik sehingga menyebabkan beban kerja yang cukup besar hanya bertumpu pada beberapa orang tenaga teknis. Hal ini tentu saja menghambat keberhasilan pekerjaan pembangunan.
- Kesesuaian Peraturan, Peraturan Walikota Surabaya yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan ternyata belum sesuai dengan amanat peraturan di atasnya, baik Peraturan Daerah Kota Surabaya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Peraturan Presiden RI.
- Inovasi dan Keberlanjutan, pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan tidak mendukung inovasi kepala sekolah. Keberlanjutan program ini juga masih menjadi permasalahan tersendiri, karena beberapa pekerjaan rehab ringan ternyata tidak tuntas di lapangan. Dampak yang timbul dari program ini antara lain, dampak individual muncul karena kualifikasi pimpinan yang kurang baik. Pimpinan dengan kualifikasi yang baik dapat mengendalikan pekerjaan dan juga dapat membawa kenyamanan dan keamanan bekerja bagi pelaksana teknis. Selain itu pemimpin dengan kualifikasi yang baik juga dapat memberikan penghargaan terhadap kinerja pegawai dengan baik. Terhambatnya pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah dapat menghambat pencapaian tujuan

organisasi yaitu Dinas Pendidikan. Permasalahan dalam pelaksanaan program dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat/sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making*. Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1-9.
- Barliana, M. S., Maknun, D., & Herman, K. (2010). Evaluasi Atas Kebijakan Peningkatan Rasio Siswa SMK: SMADitelaah dari Kesiapan Sarana dan Prasarana. *Invotec*, 6(2), 529-538.
- Berthanilla, R., Marthalena, M., & Nugroho, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Penetapan Kota Serang Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten (Studi Reformasi Birokrasi Pelayanan di Kecamatan Taktakan Kota Serang). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 274-287.
- Dye, T. R. (1987). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, New Jersey.
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. *Inklusi*, 1(2), 221-248.
- Indradi, S. S. (2006). *Dasar dasar & Teori Administrasi Publik*. Agritek YPN.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Agama Islam dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Sabrina, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92-103.
- Subarsono (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publish.
- Winarno, B. (2002) *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo.

Lampiran 1. Reduksi Data dan Triangulasi Sumber

| Persoalan Penelitian | Reduksi Data-Triangulasi Sumber | | | | Pola Hubungan |
|--|--|--|--|---|--|
| | Pelaksana | | Pengguna | | |
| | PPKm | Ka. Rayon | Sekpro | Sekolah | |
| Bagaimana pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan? | Perlu perbaikan struktur kelembagaan Kualifikasi SDM Perbaikan sumber daya lainnya Kesesuaian dengan hirarki peraturan | Kualifikasi dan jumlah personil kurang Perlu perbaikan struktur kelembagaan | Perlu perbaikan struktur kelembagaan Jumlah dan kualifikasi personil Jumlah sumber daya lainnya | Pemenuhan material kurang Pelaksanaan program kurang mendukung inovasi sekolah Pekerjaan tidak tuntas Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian lebih panjang | Struktur kelembagaan Sumber daya (manusia, material, mesin) Peraturan Inovasi Keberlanjutan |
| Apa saja masalah yang dihadapi dalam pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan? | kelembagaan Jumlah dan kualifikasi SDM Sumber daya lainnya | Jumlah dan kualifikasi Personil Kelembagaan | Struktur organisasi belum sesuai Jumlah dan kualifikasi SDM terbatas Jumlah sumber daya lainnya terbatas | Pembangunan besar hanya untuk melanjutkan pekerjaan terdahulu Belum tersedianya anggaran pembangunan insidental | Struktur kelembagaan Sumber daya (manusia, material, mesin) Metode manajemen beban kerja |
| Apa dampak individual, dampak organisasional, dampak kepada masyarakat (sekolah) yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan? | Dampak individual : Kualifikasi pemimpin yang tidak sesuai akan menghambat pelaksanaan program Dampak terhadap organisasional : pencapaian tujuan akan terhambat Dampak terhadap masyarakat : kepercayaan terhadap organisasi semakin menurun. | Dampak individual : Penghargaan terhadap personil belum memadai. Dampak terhadap organisasional : pencapaian tujuan akan terhambat Dampak terhadap masyarakat : kepercayaan terhadap organisasi semakin menurun. | Dampak individual : tidak terpengaruh Dampak organisasional : Ketepatan pelaksanaan program | Dampak kepada masyarakat : kenyamanan dan keselamatan peserta didik terganggu | Dampak individual : kualifikasi pimpinan, penghargaan terhadap pegawai Dampak organisasional : pencapaian tujuan organisasi Dampak sekolah : kepercayaan masyarakat, kenyamanan dan keselamatan masyarakat berkurang |

| Persoalan Penelitian | Reduksi Data-Triangulasi Sumber | | | | Pola Hubungan |
|---|--|---|--|--|--|
| | Pelaksana | | Pengguna | | |
| | PPKm | Ka. Rayon | Sekpro | Sekolah | |
| Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan gedung sekolah? | Struktur organisasi Efektivitas dan efisiensi anggaran | Perbaikan Struktur organisasi Perbaikan jumlah dan Kualifikasi SDM Penghargaan kepada SDM | Perbaikan struktur organisasi/ kelembagaan Jumlah dan kualifikasi SDM Jumlah sumber daya lainnya | Perlunya perencanaan yang matang Komunikasi dengan pihak sekolah Transparansi anggaran | Struktur kelembagaan Anggaran Manajemen kerja Sumber Daya Perencanaan Komunikasi |

Sumber: Data Diolah